

PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS DALAM ERA GLOBAL

Dewi Pusposari
Mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Negeri Malang
d_pusposari@yahoo.com

Abstrak: Berbagai upaya dilakukan agar terwujud pendidikan yang ideal bagi seluruh pihak. Termasuk di dalamnya mewujudkan demokratisasi pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan dipandang perlu karena untuk menghindari kemungkinan pemaksaan kehendak dari satu kelompok, menghindari pengambilan keuntungan bagi sebagian pihak, dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demokratisasi proses pendidikan bermakna menjamin dan mengembangkan kebebasan akademik. Demokrasi merupakan benteng pengembangan moral masyarakat dan menjadi sebagai lembaga pengontrol dari pelaksanaan nilai-nilai kebenaran, keindahan, moral, dan agama. Demokrasi dapat dikembangkan dengan meningkatkan pemikiran kritis, pemikiran alternatif, penjaminan kebebasan berpikir dan bertanggung jawab atas alternatif yang dipilih. Demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu tersebut baik secara fisik maupun mental spiritual. Demokrasi juga mengakui bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena itu, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik berbeda satu sama lain dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Dengan demikian pendidikan yang demokratis memberikan pelayanan berbeda kepada sasaran didik sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Kata-kata Kunci: demokrasi, pendidikan, kebebasan, berpikir

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat belajar (*learning society*) perlu diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat memilih belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan falsafah negara. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan prinsip belajar seumur hidup. Selama ini kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan telah menuju pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga secara konseptual pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Realitanya masih cukup banyak diantara kelompok usia sekolah yang tidak/belum dapat menikmati pendidikan karena alasan tertentu baik karena ketidakterjangkauan biaya, tempat maupun kesempatan, sehingga hak mereka seolah “terampas” dengan sendirinya. Kebebasan masyarakat dalam memilih kebutuhan belajar adalah sesuai dengan semangat demokrasi pendidikan di Indonesia. Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar

semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis.

Sejarah Pertumbuhan Demokrasi

Pada awal abad ke 6-3 SM di era Yunani kuno dilaksanakan demokrasi dengan sistem demokrasi langsung yaitu suatu bentuk proses pemerintahan yang seluruh hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan atau kratein yang berarti memerintah. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “rakyat berkuasa”. Dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan), yang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln “*the government from the people, by the people and for the people*” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

Demokrasi mempunyai wujud konkret sebagai program dan sistem politik pada akhir abad pertengahan yang merupakan wujud pemikiran akan adanya hak-hak politik rakyat. Agar ada jaminan hak-hak politik rakyat tersebut berjalan lebih efektif muncullah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang melalui konstitusi baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis (konvensi). Gagasan ini disebut sebagai konstitualisme, yang dikenal sebagai negara konstitusional atau negara hukum. Ada empat unsur Negara hukum dalam arti klasik, yaitu: (1) adanya hak-hak manusia, (2) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu, (3) adanya pemerintahan berdasarkan aturan atau Undang–Undang, dan (4) adanya peradilan administrasi.

Menurut Zamroni (2001) Demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua negara. Sedangkan Sadiman (2001) berpendapat bahwa demokrasi adalah menetapkan dasar-dasar kebebasan dan persamaan terhadap individu-individu yang tidak membedakan asal, jenis agama, dan bahasa. Menurut Kusuma (2001) istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada di tangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substansif demokrasi membawa semangat dalam pendidikan baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.

Negara Demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara serta mempertanggungjawabkan pada rakyat. Demokrasi dalam sistem Pendidikan Nasional di Indonesia yang diatur dalam UU no 2 tahun 1989 BAB III pasal (5) menyebutkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya, bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mereka. Arbi (1988) berpendapat

pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak (peserta didik) mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Kusuma (2001) mengatakan demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil.

Demokrasi dalam Perspektif Pendidikan

Demokrasi secara terminologi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilihan bebas. Prinsip utama demokrasi adalah (a) kedaulatan di tangan rakyat, (b) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari mereka yang diperintah, (c) kekuasaan mayoritas, (d) hak-hak minoritas, (e) jaminan hak-hak azasi manusia, (f) pemilihan yang bebas dan jujur, (g) persamaan di mata hukum, (h) proses hukum yang wajar, (i) pembatasan pemerintahan secara konstitusional, (j) pluralisme dalam aspek sosial ekonomi dan politik, (k) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu tersebut baik secara fisik maupun mental spiritual. Demokrasi juga mengakui bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena itu, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik berbeda satu sama lain dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu pendidikan yang demokratis harus memberikan pelayanan berbeda kepada sasaran didik yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Termasuk di dalamnya pendidikan dan pembinaan bahasa Indonesia. Pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar-mengajar. Partisipasi orang tua dan masyarakat juga amat penting dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan proses pendidikan tersebut.

Demokrasi, dalam lingkup pendidikan, adalah pengakuan terhadap individu peserta didik, sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri, karena demokrasi pada dasarnya bersifat alami dan manusiawi. Ini berarti bahwa penelitian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus mengakui dan menghargai kemampuan dan karakteristik individu peserta didik. Tidak ada unsur paksaan atau mencetak siswa yang tidak sesuai dengan harkatnya. Dengan demikian, demokrasi berarti perilaku saling menghargai, saling menghormati, toleransi terhadap pihak lain termasuk pengendalian diri dan tidak egois. Dalam proses pendidikan, semua pihak yang terkait menyadari akan alam atau atmosfer yang bernuansa saling menghargai tersebut, yaitu antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa dan antara guru

dengan pihak-pihak anggota masyarakat termasuk orang tua dan lain-lain. Ini berarti bahwa dalam semangat demokrasi seseorang harus tunduk kepada keputusan bersama atau kesepakatan bersama. Tidak terjadi keharusan penerimaan tanpa unsur paksaan, tetapi kesepakatan bersama yang akan menjadi sikap mereka semua. Dengan kata lain, seseorang menerima keputusan bersama dengan rasa ikhlas karena menomerduakan kepentingan pribadi dan tunduk kepada tuntutan kesejahteraan umum.

Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian *equal opportunity for all*. Artinya, anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Dalam kaitan antara pendidikan dan demokrasi terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. *Pertama*, muncul di lingkungan penganut paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan penguasa. Sebab, pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung menjadi robot. Menurut kelompok ini pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan watak demokratis, meningkatkan daya kritis, mendorong semangat untuk mengejar pengetahuan dan senantiasa menjunjung harkat dan martabat manusia. *Kedua*, menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam pandangan ini pendidikan sebagai alat sosialisasi politik merupakan kenyataan yang tidak perlu dipungkiri lagi. Dewasa ini tidak ada satu pun negara yang tidak menggunakan pendidikan sebagai instrumen sosialisasi politik, bahkan di Amerika Serikat sekalipun yang dianggap sebagai *pendekar* demokrasi dan HAM. Mereka tetap menjadikan pendidikan sebagai alat indoktrinasi politik. Dalam buku-buku teks Civics selalu ditekankan bahwa sistem kapitalitas paling baik dan sistem lain jelek. Demikian juga dalam setiap buku diuraikan bahwa kehidupan negara-negara sedang berkembang masih sangat terbelakang.

Demokrasi dan pendidikan, sesungguhnya, saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai bubungan timbal balik. Misalnya pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis (sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan). Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Begitu juga sebaliknya, agar nilai-nilai demokrasi (hak-hak asasi), kebebasan, keadilan, persamaan dan keterbukaan) dapat dipahami dan dimiliki peserta didik, maka diperlukan pendidikan. Pendidikan tersebut berfungsi menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik (pendidikan demokrasi atau pendidikan tentang demokrasi).

Mewujudkan Demokrasi Melalui Pendidikan

Pendidikan mempunyai cakupan luas, jalur sekolah, luar sekolah dan keluarga. Pendidikan sekolah sendiri terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan demokrasi dalam dan lewat sekolah, menurut John Dewey (2004), sekolah harus menjalankan tiga fungsi berikut, (1) sekolah harus memberikan lingkungan yang disederhanakan dari kebudayaan kompleks yang ada, yaitu dipilih dari segi fundamental yang dapat diserap oleh siswa, (2) sekolah sejauh mungkin mengeliminasi hal-hal yang tidak baik dari lingkungan yang ada, meniadakan hal-hal yang remeh dan tak berguna dari masa lampau dan memilih yang terbaik dan memungkinkan anak-anak menjadi warga negara yang lebih baik dan membentuk masyarakat masa depan yang lebih maju dan sejahtera, (3) sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial serta mengusahakan agar masing-masing individu mendapat kesempatan untuk melepaskan dirinya dari keterbatasan-keterbatasan kelompok sosial dimana dia lahir.

Konsep tersebut sesuai dengan paradigma pendidikan sistematis organik yang menyatakan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki empat ciri sebagai berikut: (1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada mengajar, (2) Pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel, (3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri dan (4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Dengan demikian, perwujudan sekolah yang mensosialisasikan paham dan sikap demokratis, seperti ditulis Zamroni (2001), dapat dikaji berdasar empat aspek: (1) aspek status siswa, berorientasi pada pendidikan modern yang mempunyai asumsi bahwa pendidikan berlangsung dari lahir sampai mati. Artinya, sekolah adalah kehidupan itu sendiri dan sebaliknya kehidupan itu adalah sekolah atau pendidikan. Karena itu, sekolah merupakan kehidupan riil siswa itu sendiri bukan tempat mempersiapkan siswa bagi kehidupan mendatang. Hal ini sesuai dengan pendapat John Dewey (2004) *school is not preparation for life but life itself* (sekolah bukan bekal untuk hidup tetapi kehidupan itu sendiri).

Implikasi dari orientasi ini adalah anak didik merupakan subyek dalam proses pendidikan. Kehidupan sosial siswa merupakan sumber transformasi kehidupan. Peran penting dalam proses pendidikan bukan terletak pada mata pelajaran yang diberikan, melainkan terletak pada aktivitas sosial siswa sendiri. Orientasi pendidikan modern ini memberikan penekanan dan tempat berkembangnya kreativitas, kemandirian, toleransi dan tanggung jawab siswa. (2) aspek fungsi guru: yaitu bahwa guru sebagai fasilitator dan motivator. Fungsi guru ini akan muncul jika siswa berstatus sebagai subyek dalam proses pendidikan, karena sebagai fasilitator dan motivator guru akan lebih banyak bersifat *tut wuri handayani* dengan memberikan dorongan dan motivasi agar siswa dapat memperluas kemampuan pandang untuk mengembangkan berbagai alternatif dalam aktivitas kehidupan dan memperkuat kemauan untuk mendalami serta mengembangkan apa yang telah dipelajari dalam proses pendidikan. (3) Dimensi Materi

Pendidikan: yaitu materi pendidikan bersifat *problem oriented*, guru menyampaikan bahan pengajaran berangkat dari problem riil yang dihadapi siswa dan lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian materi yang bersifat teoritis akan dihubungkan dengan realitas kehidupan siswa. Guru dituntut berperan aktif, kreatif dan berani membawa isue-isue kontroversial ke dalam proses belajar mengajar. Adapun para siswa mendapat kesempatan untuk mendiskusikan isue-isue yang sensitif tersebut. (4) Dimensi Manajemen Pendidikan: yaitu manajemen yang bersifat desentralisasi yaitu kebijakan pendidikan lebih banyak ditentukan pada level daerah, level sekolah dan level kelas. Dengan desentralisasi ini kreativitas dan daya inovatif guru sangat diperlukan. Dimensi manajemen yang bersifat desentralisasi diterapkan apabila dimensi siswa sebagai subyek pendidikan, fungsi guru sebagai dinamisator dan fasilitator dan materi pengajaran bersifat *problem oriented*. Orientasi pendidikan dengan keempat aspek yang dikemukakan Zamroni (2001) tersebut akan mewujudkan praktek pendidikan yang demokratis dan akan menghasilkan lulusan individu yang demokratis, kreatif, toleran dan mandiri. Ciri-ciri lulusan semacam ini akan sangat berperan mewujudkan masyarakat demokratis.

Membangun Sistem Pendidikan Demokratis

Impian pendidikan berkualitas hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan dan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kenyataannya kehidupan yang demokratis masih lebih merupakan keinginan daripada kenyataan. Konsep sistem pendidikan yang demokratis terkait dengan bagaimana pendidikan tersebut disiapkan, dirancang, dan dikembangkan sehingga memungkinkan terwujudnya ciri-ciri atau nilai-nilai demokrasi. Ini juga bersifat umum dalam arti mengemas sistem pendidikan dengan seluruh komponen, yaitu kurikulum, materi pendidikan, sarana prasarana, lingkungan siswa, guru dan tenaga pendidikan lainnya, proses pendidikan dan lainnya. Bisa juga bersifat khusus yaitu pengemasan komponen-komponen tertentu dari sistem pendidikan tersebut misalnya bagaimana kurikulum atau bahan pelajaran atau proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokrasi.

Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan tujuh butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur-prosedur yang demokratis dan mencerminkan pandangan serta jalan hidup demokratis yang diinginkan. Tujuh butir tersebut: (1) mengutamakan kepentingan masyarakat, (2) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, (5) memiliki itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, (6) musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (7) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang

Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sistem pendidikan yang demokratis tersebut perlu diperjelas secara makro di tingkat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia atau tingkat mikro di lingkungan sekolah atau kelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis sebagaimana yang dinyatakan Sadiman, sebagai berikut:

1. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah/daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Kurikulum juga harus menggariskan adanya mata pelajaran-mata pelajaran yang menggiring suasana demokratis dalam proses belajar mengajar dan pada gilirannya dapat menanamkan nilai-nilai demokratis pada diri anak didik.
2. Tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan belajar (buku dan media) yang mereka nilai baik. Bahan belajar sendiri juga harus dikemas dengan mengakui bahwa setiap siswa berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangannya memungkinkan adanya interaksi aktif dan menempatkan sasaran didik sebagai subyek bukan obyek pendidikan.
3. Sarana prasarana pendidikan pun harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari. Misalnya: ruang kelas dengan meja kursi bangku tidak kaku tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi, perpustakaan memiliki koleksi warna-warni yang tidak saja memotivasi siswa untuk mengunjungi dan membaca tetapi juga memberikan alternatif pilihan sumber belajar. Perpustakaan, baik perpustakaan kelas maupun perpustakaan sekolah hendaknya menjadi bagian yang menyatu dengan proses belajar mengajar di kelas. Sebagai individu anak hendaknya memiliki berbagai kebutuhan, maka sekolah atau lembaga pendidikan haruslah mampu memberikan lingkungan belajar yang bisa memenuhi kebutuhan biologis (makanan, minuman, rasa aman dan tempat istirahat), kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial (komunikasi dan interaksi dengan sesama manusia).
4. Sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Guru harus mampu menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa tidak memaksakan kehendak, merasa paling tahu dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Peran guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar karena telah/makin banyak sumber belajar lain di sekitar kehidupan anak.
5. Proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Berkaitan dengan konsep kelima, Sadiman (2001) menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi adalah sebagai berikut.

- (a) Menempatkan anak didik sebagai individu yang unik. Mereka memiliki minat, bakat, efisiensi alat indra, kecerdasan, cara merespon pelajaran yang diberikan,

ketrampilan dan sikap berbeda satu sama lain sehingga perlu diberikan treatment yang berbeda. Proses pendidikan hendaknya mampu menciptakan konsep diri yang positif pada anak didik. Masing-masing anak harus merasa sanggup, aman dan menemukan tempatnya masing-masing di dalam masyarakat sekolah. Tidak ada anak yang *unknown* semua baik yang pandai maupun yang lemah semua mendapat perhatian.

- (b) Pembelajaran hendaknya bersifat individual dalam arti tiap siswa mendapatkan cara penanganan sesuai dengan karakter masing-masing. Apabila hal ini masih sulit dilakukan maka bisa ditempuh cara pengelompokan siswa berdasarkan prestasi "*achievement grouping*". Kelompok ini bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masing-masing individu. Strategi ini dimaksudkan memberi kesempatan pada anak untuk meningkatkan diri sejalan dengan kecepatan belajarnya.
- (c) Sebagai konsekuensi dari pembelajaran individual tersebut perlu diterapkan sistem maju berkelanjutan "*continuous progress*". Pelaksanaan sistem ini memungkinkan siswa menyelesaikan pendidikan lebih cepat, lebih lambat atau tepat pada waktunya. Sistem maju berkelanjutan membuka peluang secara luas bagi perkembangan pribadi anak karena anak dapat maju tanpa hambatan, kelas atau tingkatan tidak lagi merupakan *barrier* untuk terus maju. Sistem ini tidak saja akan menguntungkan anak, akan tetapi juga bisa menjadi pemicu peningkatan atau percepatan-*achievement*.
- (d) Demokrasi menghargai kebebasan individu untuk mengekspresikan diri namun tetap menghargai norma dan etika. Proses pendidikan di sekolah bisa mewujudkan hal ini dengan sengaja dan memberikan paling tidak satu jam belajar bebas "*independent study*" setiap minggunya. Dalam pelajaran ini anak belajar bertanggungjawab atas kebebasan yang diberikan. Dengan menggunakan perpustakaan dan sumber belajar lain, anak belajar mengarahkan diri, menolong diri, disiplin dan mengontrol diri. Dengan mencari kesibukan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan masing-masing anak berusaha memenuhi kebutuhan. Pelajaran ini juga melatih siswa menghargai waktu, mengembangkan kemampuan anak untuk mengarahkan diri (*self direction*), mendisiplinkan diri (*self discipline*), menguasai diri (*self control*), menolong diri sendiri (*self help*), mengandalkan diri (*self reliance*) dan menyibukkan diri (*self activity*).
- (e) Untuk menetralkan tumbuhnya sikap individualistis perlu disiapkan pelajaran kelompok. Proses belajar dalam kelompok ini tidak saja membina sikap toleransi anak tetapi juga memberi kesempatan untuk mengadakan interaksi sosial, belajar bahwa masih ada orang di luar diri sendiri, bersikap terbuka terhadap perubahan dan saling membantu.
- (f) Proses belajar mengajar harus memberi kesempatan anak didik untuk mengekspresikan dirinya baik lisan maupun tertulis. Untuk metodologi pembelajaran yang dipilih harus memungkinkan hal tersebut. Misalnya: diskusi,

seminar, observasi, eksperimen perorangan maupun kelompok dan sebagainya. Pelajaran mengarang yang sementara ini diabaikan karena berat dalam mengoreksi justru harus ditingkatkan dan diperhatikan. Tata krama secara lisan dan tertulis harus dipelajari anak. Dalam kaitan ini terasa penting perpustakaan yang terpadu dengan proses belajar mengajar di kelas.

- (g) Peran serta aktif anak didik tidak saja digalang dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di rumah, tetapi juga menetapkan tata tertib atau aturan yang harus ditaati sendiri. Juga dalam kegiatan seperti mengelola majalah sekolah. Ini jelas merupakan cerminan hidup demokratis.
- (h) Grafik prestasi kelas dan grafik prestasi pribadi yang dipasang di kelas menunjukkan posisi masing-masing anak dalam mata pelajaran tertentu. Keterbukaan ini mengajarkan pada anak kejujuran untuk mengakui kelemahan atau kekurangan diri dan kekurangan atau kelebihan orang lain sekaligus memotivasi anak untuk meningkatkan diri dan motivasi berprestasi.
- (i) Evaluasi dalam pendidikan yang demokratis tidak hanya menilai prestasi siswa tetapi juga menilai kinerja para guru/pendidik dan sistem secara keseluruhan. Guru hendaknya berjiwa besar atau berlapang dada untuk menerima penilaian dari siswa dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut.

Demokrasi pendidikan di Indonesia

Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagai-mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Mengenai tanggung jawab pemerintah secara tegas telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Terkait dengan pernyataan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut secara tegas memperkuat tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan.

Secara retorik kedua ayat tersebut, telah cukup dapat dipergunakan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang pendidikan yakni diberinya peluang bahkan dalam batas tertentu diberikan kebebasan, kepada keluarga dan masyarakat untuk

mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ditiadakan, dikurangi atau setidaknya ditinjau kembali hal-hal yang sudah tidak relevan.

Bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini terdapat dalam :

1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, 6, 7 dan pasal 8 ayat 1, 2 dan ayat 3.
3. Garis-garis Besar Haluan Negara di Sektor Pendidikan.

Demokrasi sebagai Usaha Penyelesaian Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia adalah munculnya beberapa masalah. Padahal pendidikan merupakan cara yang utama dalam peningkatan mutu SDM Indonesia. Kali ini masalah yang muncul dalam pembahasan makalah demokrasi pendidikan di Indonesia meliputi:

a. Rendahnya partisipasi masyarakat

UUSPN pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Dalam praktiknya peran masyarakat dalam pendidikan rendah. Misalnya masih rendahnya pemikiran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, ada kalanya dalam hal kegiatan sekolah kadang kala orang tua kurang mendukung dalam kegiatan sekolah tersebut, dan lain-lain

b. Rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis

Telah dijelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan. Kebijakan Pemerintah ini kurang demokratis dalam hal kurang meratanya pendidikan. Pemerintah hanya mempertimbangkan potensi pendidikan secara nasional. Padahal setiap daerah potensi dalam hal pendidikan berbeda-beda. Masalah ini menimbulkan kurang demokratisnya kebijakan pemerintah.

c. Tantangan kehidupan global

Lambat laun semua hal mengalami perkembangan. Salah satunya dalam hal pendidikan. Pendidikan juga mengalami perkembangan secara global. Buktinya pemerintah kita menyempurnakan kurikulum yang dulunya hanya menyangkut kognitif saja. Sekarang terdiri aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Lebih khusus dalam hal demokrasi pendidikan juga mengalami perkembangan. Tapi hal-hal yang terkait dalam pendidikan belum mengikuti perkembangan global.

Demokrasi dalam pendidikan dianggap dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Dengan cara yang demokratis, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan misalnya dengan penyempurnaan kurikulum, pelaksanaan paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila yang didalamnya mengandung unsur – unsur pendidikan yang Berketuhanan, Berkemanusiaan, dan Berbudi pekerti luhur dengan diterapkannya paradigma ini maka demokrasi pendidikan akan dapat diwujudkan.
- b. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan misalnya kebijakan pemerintah dengan mencanangkan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Hal ini sangat bermanfaat untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, menambah media belajar siswa, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, menambah referensi buku-buku perpustakaan, membuat laboratorium praktek sesuai standar. Selain dana BOS ada juga beasiswa bagi anak yang orang tuanya kurang mampu maupun anak yang berprestasi baik. Hal ini sangat bermanfaat dalam membantu kelangsungan pendidikan mereka.
- c. Peningkatan relevansi pendidikan mengandung arti karena ada ketidakserasian antara hasil pendidikan (*output*) dengan kebutuhan dunia kerja. Permasalahan utama karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga sekarang banyak didirikan sekolah-sekolah kejuruan yang mencetak siswa yang mempunyai ketrampilan sesuai profesi. SMK adalah jawaban dari permasalahan ini.
- d. Untuk mengatasi rendahnya kualitas guru pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa guru SD minimal harus S1 (strata 1) dan dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan kode etik guru untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan. Guru dituntut tidak hanya mengajar melainkan juga harus memberi contoh yang baik atau teladan bagi siswa-siswanya.
- e. Untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan guru pemerintah menaikkan gaji guru, berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan lain-lain, sehingga dengan meningkatkan kesejahteraan guru diharapkan guru itu dapat mencintai profesinya dengan tulus artinya guru itu tidak akan mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Diharapkan guru dapat berkonsentrasi dalam proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar.

Pembinaan dan Pengembangan Kebahasaan dan Kesusastraan Indonesia sebagai Wujud Demokrasi Pendidikan

Muslich (2010) merumuskan berbagai pemikiran terkait Pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesusastraan Indonesia sebagai bagian integral dari demokrasi pendidikan Indonesia. Melalui pembinaan dan pengembangan, dilaksanakan berbagai kegiatan terkait pengelolaan kebahasaan dan kesusastraan Indonesia, misalnya (1) masalah kebahasaan dan kesusastraan Indonesia, (2) masalah kebahasaan dan kesusastraan daerah, atau (3) masalah penggunaan dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing. Dua tujuan pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesusastraan

Indonesia adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah membina seluruh rakyat Indonesia agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap berikut.

- 1) Pengetahuan yang sah tentang (a) kedudukan, fungsi, dan nilai bahasa dan kesusastraan Indonesia dan daerah dan bahasa-bahasa asing tertentu; (b) sistem dan struktur masing-masing bahasa dan kesusastraan itu; dan (c) problematik pemakaian masing-masing bahasa dan kesusastraan tersebut.
- 2) Keterampilan hakikat yang memadai dalam (a) penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi (bertutur, menyimak, membaca dan menulis), sebagai alat bernalar/berpikir, dan sebagai alat memandang masalah-masalah kehidupan, dan (b) mengapresiasi serta memanfaatkan karya-karya sastra Indonesia.
- 3) Sikap yang positif terhadap bahasa dan kesusastraan dan daerah yang berupa (a) rasa bangga memilikinya, (b) dorongan menghormatinya, (c) setia menggunakannya dengan baik dan benar, dan (dengan) merasa prihatin akan perlakuan-perlakuan yang kurang pada tempatnya.

Tujuan yang kedua adalah membina bahasa dan kesusastraan Indonesia sehingga bahasa Indonesia memiliki karakteristik berikut.

- 1) Utuh dan padu sebagai satu bangsa tersendiri dengan perangkat ciri yang secara khas memadai serta membedakan eksistensinya dari bahasa-bahasa lain.
- 2) Tetap bertahan dan terpelihara sebagai Bahasa Nasional, Bahasa Negara atau Bahasa Resmi, dan Bahasa Kebudayaan Nasional.
- 3) Memiliki kebakuan serta daya wadah dan daya ungkap yang akurat sebagai alat komunikasi.
- 4) Tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.
- 5) Terpakai di berbagai bidang kehidupan oleh seluruh lapisan.

Kurikulum Nasional 2013 sebagai Wujud Demokrasi Pendidikan

Yasa (2016) menyebutkan bahwa kurikulum Nasional 2013 merupakan salah satu wujud demokrasi pendidikan. Hal ini tampak pada aspek asesmen. Asesmen dalam kurikulum 2013 memuat: (1) aspek penilaian yang menggunakan rentangan 0-100 sebagaimana aduan orang tua siswa yang sulit memahami penilaian rentang 1-4. Dalam hal ini, Kurikulum Nasional 2013 memahami dan memberikan keadilan kepada masyarakat, bukan hanya guru yang memahami makna nilai tersebut. (2) Penilaian dilakukan tidak hanya penilaian atas pembelajaran (*assessment of learning*), melainkan juga penilaian untuk pembelajaran (*assessment for learning*), dan penilaian sebagai pembelajaran (*assessment as learning*) (Kurikulum Nasional.net). Penilaian ini tampak demokratis jika dibandingkan dengan Kurikulum 2013 yang hanya melakukan *assessment of learning*. (3) sekolah dapat menentukan batas ketuntasan di atas standar dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu sesuai dengan karakteristik dan potensi sekolah. Pada bagian ketiga ini, demokrasi sangat tampak karena penilaian tidak ditentukan sepenuhnya oleh pusat, melainkan disesuaikan dengan potensi siswa. (4) Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan observasi yang dituangkan dalam

catatan guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling (BK), dan wali kelas yang berupa catatan anekdot, catatan kejadian tertentu, dan informasi lain yang valid dan relevan. Penilaian ini tampak demokratis karena guru tidak secara sepihak memberi penilaian pada siswa. (5) Kurikulum Nasional 2013 mengembangkan kurikulum nasional sebagai acuan minimal di semua sekolah di Indonesia terintegrasi di dalam kurikulum setiap sekolah, memberikan ruang bagi pengembangan ragam kurikulum daerah berbasis keunggulan lokal, meningkatkan kapasitas sekolah (termasuk guru) dalam menerapkan kurikulum nasional dalam tahap selanjutnya secara mandiri mengembangkan kurikulum sekolah sesuai konteks kebutuhannya.

Pandangan Dewey (2004) tentang demokrasi sebagai sebuah pandangan hidup terangkum dalam kurikulum nasional 2013 bahwa konteks sekolah dan pembelajaran di kelas harus mencerminkan demokrasi dan sebagai pembiasaan (pembentukan) perilaku, nilai-nilai, atau sebagai sebuah sarana untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih baik. Demokrasi harus memberi kebebasan berperilaku untuk realisasi diri penuh makna pada diri individu (siswa) (Dewey, 2004: iv). Para guru, kepala sekolah, siswa, dan masyarakat sekolah lainnya diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri (keterampilan) sesuai dengan potensi masing-masing. Sekolah yang menganut paham demokratis akan mengemas pendidikan dengan memperhatikan hal-hal seperti: (1) pendidikan untuk semua, semua siswa mendapatkan perlakuan sama untuk mencapai kompetensi keilmuan, basis skill dan keterampilan yang ingin dicapai oleh kurikulum, (2) memberikan skill dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi yang menjadi tuntutan pasar, (3) penekanan pada kerja sama, memberikan pengalaman pada siswa dalam bekerja sama dengan yang lain melalui penugasan kelompok pembelajara, (4) pengembangan kecerdasan ganda, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan multiple intelligence mereka dengan memberikan peluang mengembangkan *skill* dan keterampilan yang beragam, dan (5) integrasi program dengan pengabdian pada masyarakat agar mereka memiliki kepekaan sosial (Lyn Hass dalam Sihono, 2011: 8).

Pentingnya Kepemimpinan yang Demokratis pada Pendidikan di Indonesia

Praktik kepemimpinan yang demokratis ialah membantu guru-guru (termasuk guru bahasa dan sastra Indonesia) memandang dirinya secara positif, memungkinkan untuk menerima mereka sendiri dan orang-orang lain serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengidentifikasi diri dengan teman-teman seprofesinya. Penggunaan metode kepemimpinan yang demokratis dalam pendidikan memungkinkan guru-guru untuk membina kelas secara demokratis dengan meletakkan titik berat pada aktifitas bersama dengan penghargaan akan keperluan, integrasi dan potensi semua anggota kelas. Kelas yang demikian menyediakan kesempatan luas untuk memperoleh sukses dan hasil yang kreatif. Pada era globalisasi ini pendidikan kepemimpinan hendaknya lebih diperhatikan. Guru-guru yang merasakan suasana kerja yang demokratis akan mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suasana yang sama

dalam kelasnya. Adalah sangat penting untuk secara terus – menerus menganalisis dan merumuskan kembali nilai-nilai demokrasi sebab hasilnya akan menentukan masa yang akan datang.

PENUTUP

Demokratisasi pendidikan merupakan suatu kebijakan yang sangat diharapkan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan peluang masyarakat untuk menikmati pendidikan menjadi semakin lebar sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Jurang pemisah antara kelompok terdidik dan belum terdidik menjadi semakin terhapus, sehingga informasi pembangunan tidak lagi menjadi hambatan. Ungkapan pendidikan untuk semua dan semuanya untuk pendidikan diharapkan bukan sekedar wacana tetapi sudah harus merupakan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya.

Dengan demikian isu tentang besarnya putus sekolah, elitisme, ketidakterjangkauan dalam meraih pendidikan, dan seterusnya dapat terhapus dengan sendirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. 2007. Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Indonesia. *Al-Wasathiyah*, Vol. 02, No. 08, hal. 11-15.
- Dewey, John. 2004. *Democracy and Education An Introduction to the Philosophy of Education*. Delhi: Aakar Books.
- Englund, Tomas. 2000. Rethinking Democracy and Education: Towards an Education of Deliberative Citizen. *J. Curriculum Studies*, Vol. 32, No. 2, 305-313.
- Kusuma, Iskandar Wiryo. 2001. *Demokratisasi Belajar dan Pembelajaran Ditinjau dari Pengalaman Empirik*, (Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang tanggal 7 Oktober 2001), 2.
- Muslich, Masnur. 2010. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rositawati, Tita. 2014. Konsep Pendidikan John Dewey. *Tadbir, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 02, No. 2, Agustus, pp 133-139.
- Sadiman, Arief. S. 2001. *Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan yang Demokratis Ditinjau dari Segi Aspek Kebijakan*. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang)
- Sihono, Teguh. 2011. Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8, Nomor 1, April, hal. 1-22.

Yasa,I Nyoman. 2016. *Menelusuri Alam Demokrasi Pendidikan Indonesia dalam Isu Lintas Kurikulum Baru*. Makalah: tidak diterbitkan.

Zamroni. 2001 *Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*.
Yogyakarta:Biograf

